

ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2018 – 2022

Srikandi Jessa

Politeknik Negeri Manado

Email: srikandijessayunirmsmamadoa@gmail.com

Abstract

Expenditure realization is an important thing for local governments because it is one of the benchmarks for the performance of government agencies. So it is hoped that the realization of this expenditure must also be optimized as best as possible so that all forms of expenditure are right on target. This research aims to analyze the realization of expenditure in the Bitung City Government for the 2018 - 2022 fiscal year. The method used is qualitative, where the author explains by describing using words a phenomenon found. The author collected data through interviews with the parties concerned and also used documentation techniques where the author collected documents related to this research in the form of the Bitung City Government LRA for the 2018 - 2022 Fiscal Year. Data analysis techniques carried out included data reduction, data presentation and drawing conclusions. From the results of this research it can be explained that the Bitung City Government spending variance analysis shows a figure of 96.40% so it is considered favorable (favourable variance). The Bitung City Government's spending growth has fluctuated due to the Covid-19 pandemic. In 2019 there was growth with a total of 18.84%, in 2020 there was a decrease of 10.23%, in 2021 there was a bigger decrease than the previous year, namely a total of 23.33% and in 2022 there was another increase with a total of 9, 63%. The compatibility analysis shows that the Bitung City Government carries out its shopping activities. The level of harmony in operating expenditure is 76.67%, while in capital expenditure it is 21.56%. The largest allocation of spending is on goods and services spending which reaches Rp. 250,298,024,864.20. Meanwhile, the efficiency level is at 96.40%, but it is still considered efficient because the City Government is not making budget savings for urgent and unavoidable reasons.

Keywords: *Analysis, Expenditures, Realization*

Abstrak

Perealisasi belanja merupakan suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah karena merupakan salah satu tolak ukur kinerja instansi pemerintah. Maka diharapkan perealisasi belanja tersebut juga harus dioptimalkan sebaik mungkin sehingga segala bentuk pengeluaran tepat pada sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perealisasi belanja pada Pemerintah Kota Bitung Tahun anggaran 2018 – 2022. Metode yang digunakan yaitu kualitatif, dimana penulis menjelaskan dengan cara menjabarkan menggunakan kata – kata suatu fenomena yang ditemukan. Penulis mengumpulkan data dengan melalui wawancara dengan pihak – pihak yang bersangkutan dan juga menggunakan teknik dokumentasi dimana penulis mengumpulkan dokumen yang terkait dengan penelitian ini berupa LRA Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2018 – 2022. Teknik analisis data yang dilakukan diantaranya, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa analisis varians belanja Pemkot Bitung menunjukkan angka 96,40% sehingga dinilai disukai (favourable variance). Untuk pertumbuhan belanja Pemkot Bitung berfluktuasi akibat adanya pandemi covid 19. Tahun 2019 terjadi pertumbuhan dengan total sebesar 18,84%, tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 10,23%, tahun 2021 terjadi penurunan yang lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu total sebesar 23,33% dan tahun 2022 kembali mengalami kenaikan dengan total sebesar 9,63%. Analisis keserasian menunjukkan bahwa Pemkot Bitung

melakukan aktifitas belanjanya. Tingkat keserasian pada belanja operasi ada pada angka sebesar 76,67%, sedangkan pada belanja modal sebesar 21,56%. Pengalokasian belanja terbesar ada pada belanja barang dan jasa yang mencapai angka Rp. 250.298.024.864,20. Sedangkan untuk tingkat efisiensinya ada pada angka sebesar 96,40% namun masih dinilai efisien karena Pemkot tidak melakukan penghematan anggaran untuk alasan yang mendesak dan tidak terhindarkan.

Kata-kata Kunci: Analisis, Belanja, Realisasi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah daerah yang punya semangat kerja berwawasan NKRI, pasti akan mengingat terus tugasnya dalam pengelolaan APBD sebagai Good Government dan Good Governance dengan memegang prinsip Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomis dan menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal dan investasi bagi daerah (Wenas et al., 2020).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD merupakan rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi – tingginya guna membiayai kegiatan – kegiatan dan proyek – proyek di daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber – sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran – pengeluaran yang dimaksud (Milenia et al., 2022). APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) (Azahra & Lubis, 2022).

Pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya sendiri diperhadapkan pada semakin besar tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik (Supit et al., 2022). Banyak cara yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bitung demi mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan daerahnya didalamnya pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang ada. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat serta negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kewajiban seluruh instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara proporsional (Vidyasari, 2022).

Salah satu unsur keuangan daerah yaitu belanja daerah. Belanja daerah merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk pengeluaran sumber ekonomi untuk segala jenis program dan kegiatan pemerintah baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjelaskan bahwa belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.

Kuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat

(Qur'ani & Panggiarti, 2022). Setiap pemerintah daerah memiliki strategi masing – masing dalam pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini alokasi belanja daerah.

Kota Bitung merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Sulawesi Utara yang memiliki semboyan “Bitung Kota Digital”. Semboyan ini tentunya selaras dengan visi Kota Bitung yaitu Terwujudnya Bitung Kota Digital yang Mandiri, Sejahtera dan Berkarakter berlandaskan Gotong royong. Adapun salah satu misi Kota Bitung yaitu menciptakan pemerintahan bersih, efektif, efisien dan hebat difokuskan pada pemerintahan yang dibentuk berlandaskan prinsip “good governance” dan “clean government” tercermin melalui kinerja aparatur pemerintah yang professional dalam melayani kebutuhan masyarakat yang semakin variatif, serta meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah. Kota Bitung setiap tahunnya melakukan penganggaran belanja yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan juga kemajuan daerah Kota Bitung. Penganggaran tersebut termuat dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bitung yang kemudian perealisasiannya dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bitung.

Realisasi anggaran merupakan suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah karena hal tersebut merupakan salah satu tolak ukur kinerja instansi pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dari anggaran yang telah dibuat di awal kegiatan beserta penggunaannya pada saat kegiatan dengan bukti – bukti transaksi sebagai bukti atas pengeluaran dana untuk kegiatan tersebut (Sheila & Rahmi, 2023).

Sebagai salah satu unsur keuangan daerah, maka belanja merupakan salah satu komponen yang ada pada LRA yang berperan penting dalam mewujudkan perencanaan – perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Maka diharapkan perealisasi belanja tersebut juga harus dioptimalkan sebaik mungkin sehingga segala bentuk pengeluaran tepat pada sasaran. Berikut gambaran realisasi belanja Pemerintah Kota Bitung di tahun anggaran 2018 – 2022.

Pada tahun 2018 realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 801.427.797.814,00, tahun 2019 sebesar Rp. 987.405.761.731,85, tahun 2020 sebesar Rp. 895.790.367.174,00, tahun 2021 sebesar Rp. 726.359.305.685,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 803.782.473.278,19. Adapun permasalahan yang muncul dari perealisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Bitung yaitu terjadinya fluktuasi atau ketidakstabilan realisasi anggaran tahun 2018 – 2022. Sehingga dampak dari fluktuasi tersebut adalah penyerapan anggaran yang belum optimal atau belum 100%. Maka perealisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Bitung belum dapat dipastikan apakah menunjukkan hasil yang baik atau tidak. Sehingga diperlukan analisis terhadap realisasi anggaran belanja sebagai bahan untuk evaluasi, koreksi dan perbaikan kedepannya.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Honga, A. F., & Ilat, V. (2014) yang berjudul Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini hanya difokuskan pada perealisasi belanja saja. Kemudian selain analisis varians, keserasian dan efisiensi belanja yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penelitian ini menambahkan analisis pertumbuhan belanja untuk mengetahui realisasi belanja yang lebih lengkap.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi pemerintahan yang didalamnya pemerintahan daerah merupakan salah satu bagian dari akuntansi publik. Akuntansi pemerintahan sendiri berkaitan dengan keuangan negara baik itu dipusat maupun daerah. Akuntansi pemerintahan daerah disebut sebagai pembukuan moneter daerah adalah cara untuk mengenali, memperkirakan, mencatat, dan memberikan pertanggungjawaban pada transaksi dari pemerintah daerah

yang diakui sebagai data dalam menentukan pilihan keuangan oleh pihak di luar pemerintah terdekat yang membutuhkannya.

Akuntansi Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah seluruh SKPD dan SKPKD, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Kebijakan akuntansi secara dinamis memuat praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas akuntansi sampai dengan entitas pelapor (Kandioh et al., 2023).

Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak – pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan (Umboh & Tinangon, 2022).

Maka disimpulkan bahwa akuntansi pemerintah daerah merupakan kegiatan dibidang jasa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk penyediaan informasi yang berguna untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bidang ekonomi oleh pemerintah.

Pada hakekatnya, akuntansi memiliki tujuan untuk memberikan informasi keuangan terhadap penggunaannya. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut, terdapat tiga tujuan akuntansi pemerintahan, yaitu:

1. **Pertanggungjawaban (accountability and stewardship)**
Pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit – unit pemerintah. Pertanggungjawaban juga mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban dan perhitungan (Hartati et al., 2020).
2. **Manajerial**
Manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah (Hartati et al., 2020).
3. **Pengawasan**
Pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien (Hartati et al., 2020).

Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup akuntansi pemerintahan yaitu mencakup akuntansi manajemen, sistem pembukuan keuangan, persiapan dan pengembangan keuangan, sistem pemeriksaan dan pengendalian, serta berbagai dampak moneter dari pendekatan pemerintah. Sektor publik dipengaruhi oleh sejumlah variabel lingkungan, termasuk faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sejarah yang mempunyai dampak signifikan karena heterogenitas sektor tersebut (Paputungan, 2023).

Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Maka dalam penyusunan dan penyajiannya pun harus sesuai dengan regulasi – regulasi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, aparat pemerintah harus mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai dasar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Maka berdasarkan pernyataan diatas, sebagai bentuk pertanggungjawaban maka pemerintah harus memahami SAP yang telah dijadikan dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi pemahaman tentang SAP maka semakin tinggi juga kualitas dalam laporan keuangan (Bestari & Wahyuni, 2023).

PP No.71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa SAP terdiri dari kerangka konseptual dan 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu:

1. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
3. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
4. PSAP 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
5. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
6. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban
10. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,
11. Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
12. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
13. PSAP 12 tentang Laporan Operasional

Oleh karena itu, dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah ini memudahkan aparat daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan dan penyajian. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas dalam hal ini relevan, dapat dipahami oleh masyarakat, andal, dan dapat diperbandingkan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari entitas terhadap pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada dalam bentuk informasi keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggambarkan keluaran atau hasil dari kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur sehingga dapat menjelaskan kinerja dan tanggung jawab pengelolaan anggaran keuangan selama satu periode tertentu (Aprsiansyah et al., 2020).

Bentuk tata kelola pemerintah yang baik salah satunya dilihat dari tingkat kualitas LKPD yang baik dan dapat dipahami oleh penggunanya. Kualitas dalam LKPD sangat penting karena bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pemerintah untuk masa mendatang. Hal ini juga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan percepatan pembangunan serta penyelesaian masalah – masalah yang dihadapi seperti kemiskinan dan kualitas SDM yang belum kompeten (Bestari & Wahyuni, 2023).

LKPD merupakan output atau hasil akhir dari serangkaian proses akuntansi pemerintah daerah. LKPD sendiri terdiri dari beberapa gabungan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam pemerintahan tersebut yang setiap LKPD tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. LKPD bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umum bukan kebutuhan pengguna, dimana tujuan tersebut adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas serta kinerja entitas yang bersangkutan yang berguna untuk pengambilan keputusan entitas tersebut.

Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Secara umum, tujuan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai PPKD adalah untuk menyajikan informasi bagi pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas entitas terkait. Ada beberapa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemda sebagai PPKD, diantaranya:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
6. Neraca
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
8. Laporan Kinerja

Anggaran

Anggaran merupakan aspek penting yang tak terpisahkan dalam laporan keuangan pemerintah. Dimana anggaran merupakan salah satu alat perencanaan yang digunakan oleh entitas pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengendalian terhadap manajemen dan operasional entitas yang bersangkutan. Anggaran merupakan salah satu pedoman pemerintah dalam melakukan setiap pekerjaan. Dimana anggaran berfungsi sebagai suatu alat perencanaan untuk pengendalian segala bentuk pendapatan dan belanja pemerintah, namun juga menjadi salah satu alat penilaian kinerja pemerintah sebagai pengguna anggaran.

Anggaran merupakan sebuah alat yang berpengaruh besar terhadap perencanaan suatu daerah maupun pengendalian pada organisasi pemerintah, karena sangat bergantung terhadap jumlah anggaran yang direalisasikan atau diberikan oleh Pemerintah, sehingga mampu memungkinkan pencapaian secara ekonomi, efektivitas dan efisiensi (value for money) dari penyelenggaraan pemerintahan, serta tujuan dari masing-masing organisasi atau instansi dapat terlaksanakan (Paat et al., 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Nomor 2 menyatakan definisi anggaran yaitu: anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran adalah alat manajemen yang berfungsi sebagai mata uang untuk operasi sehari-hari dan memastikan bahwa tujuan organisasi terpenuhi. Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen untuk merencanakan sumber daya yang akan diperoleh dan digunakan, serta mengendalikan bagaimana sumber daya tersebut digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tertentu (Anggraini et al., 2023).

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan mengenai realisasi anggaran yaitu menyangkut pelaporan tentang penggunaan anggaran dalam periode anggaran tertentu apakah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam pencapaian target kinerja yang telah disepakati bersama (Paat et al., 2019).

Menurut PP 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, pembiayaan dari sesuatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

1. Informasi mengenai sumber, alokasi dan pengguna sumber daya ekonomi.
2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi penggunaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan (Amianto & Sati, 2023).

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebutkan bahwa manfaat laporan realisasi anggaran bagi pengguna laporan adalah sebagai bahan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber – sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
4. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi : (1) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; (2) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan (3) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Maka dapat disimpulkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran atau yang disingkat LRA merupakan suatu laporan keuangan yang menyajikan sumber pendapatan bahkan alokasi pemakaian sumber ekonomi serta menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. LRA bertujuan menetapkan dasar – dasar LRA untuk pemenuhan tujuan akuntabilitas yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan keputusan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: (a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya, (b) Cakupan entitas pelaporan (c) Periode yang dicakup (d) Mata uang pelaporan, (e) Satuan angka yang digunakan. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: (a) Pendapatan LRA; (b) Belanja; (c) Transfer; (d) Surplus/defisit-LRA; (e) Penerimaan pembiayaan; (f) Pengeluaran pembiayaan; (g) Pembiayaan neto; dan (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA) (Majampoh & Datu, 2022).

Analisis Belanja Daerah

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, belanja daerah adalah pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengontrol pengeluaran daerah, meningkatkan efisiensi pengeluaran, dan menghemat anggaran. Pentingnya mengukur kinerja fiskal berguna untuk mengevaluasi akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah (Sholikhah & Priyono, 2022).

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Sejauh mana pemerintah melakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan yang tidak tepat sasaran (Hasanah & Anitasari, 2020).

Adapun tahapan – tahapan yang digunakan dalam menganalisis belanja daerah sebagai berikut.

Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran belanja (Chartady et al., 2022). Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu:

1. Selisih disukai (favourable variance), diberi tanda F.
2. Selisih tidak disukai (unfavourable variance), diberi tanda UF.

Jika selisih realisasi belanja lebih kecil dari anggaran berarti mengidentifikasi favourable variance atau penghematan anggaran. Sebaliknya jika selisih realisasi belanja lebih besar dari anggaran berarti mengidentifikasi unfavourable variance atau adanya pemborosan anggaran (Silitonga, 2022).

Adapun rasio yang digunakan dalam menghitung varians belanja adalah:

$$\text{Varians Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t}{\text{Anggaran Belanja Tahun } t} \times 100\%$$

Analisis Pertumbuhan Belanja

Rasio pertumbuhan (growth ratio) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai (Digantari, 2024).

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t-1}{\text{Realisasi Belanja } t-1}$$

Analisis Kecerassian Belanja

Analisis ini berguna untuk memahami antar belanja yang mengalami keseimbangan. Rasio keserasian memberikan gambaran bagaimana pemerintah daerah secara optimal mampu memberikan prioritas alokasi dana (Sholikhah & Priyono, 2022).

1. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
Rasio ini memberi informasi tentang porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$$

2. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja
Rasio ini digunakan untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila hasil kerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (Silitonga, 2022).

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, mengenai kriteria tingkat efisiensi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan melebihi 100%, maka anggaran belanja tidak efisien.
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan sebuah metode yang akan digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Sementara metode merupakan cara pengumpulan data untuk sebuah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih jenis penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu (Waruwu, 2023).

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan beberapa hal, diantaranya mencari data, mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data tersebut. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bitung tahun 2018 – 2023.

Maka berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian ini, yaitu dalam melakukan sebuah

penelitian penulis harus mengamati fenomena apa yang akan diteliti dan kemudian harus memahami fenomena tersebut. Penulis juga memerlukan data sebagai bahan acuan, dimana data tersebut dapat diperoleh dengan cara wawancara dan survei tetapi dapat juga mengambil data yang sudah ada berupa dokumen. Data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah yang kemudian data – data tersebut dianalisis.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bagian Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung yang beralamat pada Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena terdapat fenomena yang sesuai dengan topik yang diteliti yaitu Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2018 - 2022. Waktu yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini adalah 4 (empat) bulan yang dimulai pada tanggal 1 Februari 2024 sampai tanggal 31 Mei 2024.

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung oleh peneliti. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung tahun 2018 – 2022.
2. Data sekunder yaitu data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dimana data tersebut sudah diolah berupa jurnal, teori, dokumen, buku, situs web, dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis memerlukan data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab antara penulis dengan narasumber guna memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Adventinus Tambaritji selaku Bendahara Pengeluaran terkait perealisasi belanja daerah. Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Fernando Makagansa selaku Sekretaris Keuangan BKAD terkait penganggaran dan perealisasi belanja daerah. Adapun pertanyaan – pertanyaan yang diajukan dalam proses wawancara, yaitu:

- a. Mengapa target anggaran belanja setiap tahun selalu berubah?
- b. Pada belanja daerah manakah yang target anggarannya belum terealisasi?
- c. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penghematan anggaran belanja?
- d. Kendala apa yang di temukan dalam perelaisasian anggaran belanja?
- e. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota Bitung dalam mencapai target anggaran?

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyediakan dokumen terkait penelitian yang sah dan akurat. Dalam hal ini penulis melakukan pengambilan data berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bitung periode 2018 – 2022.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan serta pencatatan terhadap keadaan maupun objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap perealisasi anggaran belanja yang terjadi di Bagian Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota Bitung.

Teknik Analisis Data

Inti dari analisis data adalah menata data. Menata data dilakukan saat mengumpulkan data lapangan. Dalam menata data, peneliti diberikan kebebasan untuk memilih dan memilah metode apa yang tepat untuk sifat penelitiannya (Thalib et al., 2022).

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman. Dimana terdapat tiga tahapan analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan, reduksi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung (Lintong et al., 2020).

Adapun data yang akan direduksi berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bitung pada Tahun Anggaran 2018 – 2022.

2. Penyajian Data dilakukan dengan menyajikan kumpulan informasi tersusun dalam rangka penarikan kesimpulan, biasanya berdasarkan tematis tertentu (Lintong et al., 2020).

Data yang diperoleh berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bitung pada Tahun Anggaran 2018 - 2022 kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif yang menganalisis perealisasi anggaran Pemerintah Kota Bitung pada Tahun Anggaran 2018 – 2022.

3. Penarikan Kesimpulan yaitu temuan baru dari data yang telah disusun berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap yang kemudian diteliti dan menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif (Thalib et al., 2022).

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka penulis melakukan penarikan kesimpulan apakah perealisasi belanja Pemerintah Kota Bitung pada Tahun Anggaran 2018 – 2022 menunjukkan hasil yang baik atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil analisis pertumbuhan belanja pemerintah Kota Bitung untuk tahun anggaran 2018 – 2022 terjadinya kenaikan untuk tahun anggaran 2019 rata - ratanya adalah sebesar Rp. 493.702.880.865,93 atau 16,26% dari tahun 2018. Kemudian pada tahun 2022 sebesar Rp. 401.891.236.639,10 dari tahun 2021.

Belanja yang paling berpengaruh dalam kenaikan pertumbuhan jumlah belanja tahun anggaran 2018 – 2022 yaitu belanja langsung sebesar 44,30% yang alokasi terbesarnya ada pada belanja barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa ada pertumbuhan belanja yang terjadi melalui kinerja pemerintah yang melakukan penyusunan anggaran. Pemerintah melakukan aktifitas belanjanya tidak hanya terfokus pada belanja langsung namun juga belanja tidak langsung walaupun ada perbedaan yang terlihat karena aktifitas belanja langsung jauh lebih besar dari belanja tidak langsung.

Analisis Keserasian Belanja Pemerintah Kota Bitung

Analisis keserasian terbagi menjadi 2, yaitu Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja.

Tabel 24. Analisis Realisasi Belanja Operasi terhadap Total Belanja Pemkot Bitung

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2018	601.599.909.797,00	801.427.797.814,00	75,07
2019	702.344.059.237,00	987.405.761.731,85	71,13
2020	670.849.194.851,00	895.790.367.174,00	74,89
2021	592.390.743.850,00	726.359.305.685,00	81,56

2022	648.906.987.357,00	803.782.473.278,19	80,73
Rata – rata	643.218.179.018,40	842.953.141.136,61	76,67

Sumber: Olahan Data, 2024

Hasil analisis belanja operasi terhadap belanja modal pemerintah Kota Bitung dari tahun 2018 – 2022 menunjukkan angka tertinggi 81,56% dan terendah 71,13% dengan rata – rata yaitu sebesar 76,67%, dimana rata – rata belanja operasi adalah sebesar Rp. 643.218.179.018,40 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp. 842.953.141.136,61. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 77% penggunaan anggaran belanja pemerintah Kota Bitung ada pada belanja operasi yang alokasi terbesarnya ada pada belanja barang dan jasa yang rata – ratanya mencapai angka sebesar Rp. 250.298.024.864,20.

Tabel 25. Analisis Realisasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Pemkot Bitung

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Modal (Rp)
2018	197.088.797.032,00	801.427.797.814,00	24,59
2019	302.862.622.352,85	987.405.761.731,85	30,67
2020	222.678.090.274,00	895.790.367.174,00	24,86
2021	71.674.810.283,00	726.359.305.685,00	9,87
2022	143.075.879.820,19	803.782.473.278,19	17,80
Rata – rata	187.476.039.952,41	842.953.141.136,61	21,56

Sumber: Olahan Data, 2024

Untuk hasil analisis belanja modal terhadap total belanja pemerintah Kota Bitung dari tahun 2018 – 2022 menunjukkan angka tertinggi 30,67% dan terendah pada angka 9,87% dengan rata – rata yaitu sebesar 21,56%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal berada jauh dibawah belanja operasi. Rata – rata belanja modal sebesar Rp. 187.476.039.952,41 sedangkan rata – rata total belanja sebesar Rp. 842.953.141.136,61 sehingga dapat dikatakan bahwa rasio belanja modal mengalami fluktuasi yang berkisar antara 9% - 30%. Sebagian besar alokasi belanja modal digunakan untuk belanja gedung dan bangunan, jalan serta irigasi dan jaringan.

Analisis Efisiensi Belanja Pemerintah Kota Bitung

Berikut ini merupakan hasil analisis efisiensi belanja Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2018 – 2022.

1. Analisis Efisiensi Belanja Pemkot Bitung T.A. 2018

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{801.427.797.814,00}{824.699.632.160,00} \times 100\%$$

$$= 97,18\%$$

2. Analisis Efisiensi Belanja Pemkot Bitung T.A. 2019

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{987.405.761.731,85}{1.030.474.532.493,00} \times 100\%$$

$$= 95,82\%$$

3. Analisis Efisiensi Belanja Pemkot Bitung T.A. 2020

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{895.790.367.174,00}{924.158.249.794,00} \times 100\%$$

$$= 96,93\%$$
4. Analisis Efisiensi Belanja Pemkot Bitung T.A. 2021

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{726.359.305.685,00}{753.872.369.794,00} \times 100\%$$

$$= 96,35\%$$
5. Analisis Efisiensi Belanja Pemkot Bitung T.A. 2022

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{803.782.473.278,19}{839.737.624.358,00} \times 100\%$$

$$= 95,72\%$$

Tabel 26. Hasil Analisis Efisiensi Belanja Pemkot Bitung

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varians (%)
2018	824.699.632.160,00	801.427.797.814,00	97,18
2019	1.030.474.532.493,00	987.405.761.731,85	95,82
2020	924.158.249.794,00	895.790.367.174,00	96,93
2021	753.872.369.794,00	726.359.305.685,00	96,35
2022	839.737.624.358,00	803.782.473.278,19	95,72
Rata - rata	874.588.481.719,80	842.953.141.136,61	96,40

Sumber: Olahan Data, 2024

Berdasarkan hasil analisis efisiensi belanja pada tabel 24, dapat dilihat bahwa rata – rata presentasi rasio efisiensi pemerintah Kota Bitung dari tahun 2018 sampai pada tahun 2022 sebesar 96,40%. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Bitung dinilai kurang efisien. Hal ini karena menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, mengenai kriteria tingkat efisiensi anggaran menyebutkan jika hasil pencapaian ada pada antara 90% - 100% maka anggaran dikatakan kurang efisien.

Kinerja pemerintah yang kurang efisien ini dilihat juga dari angka perealisasi belanja yang hampir 100% dari anggaran yang ditetapkan dimana rata – rata perealisasi belanja adalah sebesar Rp. 842.953.141.136,61 dari anggaran belanja sebesar Rp. 874.588.481.719,80. Maka berdasarkan analisis efisiensi ini pemerintah pun dinilai belum melakukan penghematan belanja.

Dari hasil analisis efisiensi belanja yang dilakukan, adapun penyebab kurang efisiennya belanja pada pemerintah Kota Bitung ini karena perealisasi belanja pada tahun 2018 yang mencapai angka 97,18%. Kemudian terjadi penurunan ditahun 2019 sebesar 95,82% namun kembali ada kenaikan yang terjadi ditahun 2020 sebesar 96,93%. Namun pada tahun 2021 dan 2022 berangsur turun menjadi 96,35% dan 95,72%.

Adanya fluktuasi terhadap efisiensi perealisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Bitung sendiri terjadi bukan tanpa sebab. Pandemi covid 19 ditahun 2019 – 2021 menjadi pengaruh terbesar bagi Pemerintah Kota Bitung sehingga Pemerintah tidak dapat melakukan efisiensi anggaran belanja karena beberapa pos anggaran dialokasikan kepada belanja bantuan sosial dan juga belanja tidak terduga dalam hal ini belanja kesehatan. Sehingga Pemerintah Kota bitung tidak sepenuhnya dapat dikategorikan kurang efisien.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis jabarkan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis varians belanja pada belanja Pemerintah Kota Bitung untuk tahun anggaran 2018 – 2022 dapat diketahui bahwa kinerja belanja Pemerintah Kota Bitung menunjukkan hasil yang baik.
2. Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan belanja tahun anggaran 2018 – 2022 menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja berfluktuasi. Tahun 2019 terjadi pertumbuhan dengan total sebesar Rp.185.977.963.917,85 atau sebesar 18,84%. Sedangkan ditahun 2020 mengalami penurunan yang ekstrim dengan total sebesar -10,23% atau sebesar -Rp.91.615.394.557,85 khususnya pada belanja modal sebesar -Rp.86.999.070.991,85 atau sebesar -16,46%. Di tahun 2021, Pemerintah Kota Bitung juga mengalami penurunan yang lebih ekstrim dari tahun sebelumnya yaitu dengan total sebesar -23,33% atau sebesar -Rp.169.431.061.489,00. Kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.77.423.167.593,19 atau sebesar 9,63%. Pertumbuhan dan penurunan belanja terbesar ada pada belanja langsung khususnya belanja modal. Penyebab penurunan sendiri adalah karena adanya pandemi covid 19 yang terjadi dari tahun 2019 – 2021.
3. Berdasarkan hasil analisis keserasian belanja Pemkot Bitung T.A 2018 – 2022 terlihat bahwa Pemerintah Kota Bitung melakukan aktifitas belanjanya yang tidak hanya terfokus pada belanja operasi saja namun juga pada belanja modal. Analisis keserasian pada belanja operasi ada pada angka sebesar 76,67%, sedangkan pada belanja modal sebesar 21,56%. Pengalokasian belanja terbesar ada pada belanja barang dan jasa yang mencapai angka Rp. 250.298.024.864,20.
4. Berdasarkan hasil analisis efisiensi belanja pada Pemkot Bitung untuk tahun anggaran 2018 – 2022 tingkat efisiensi perealisasi belanja Pemkot Bitung ada pada angka 96,40%. Dapat dikatakan bahwa Pemkot Bitung dinilai kurang efisien karena perealisasi hampir mencapai 100%. Namun melihat kembali ditahun 2019 – 2021 dimana terjadinya pandemi covid 19 sehingga Pemerintah harus menggunakan seluruh anggaran belanja untuk pos belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Kemudian belanja modal dialokasikan untuk belanja yang lebih penting seperti belanja kesehatan.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan seperti pada kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kota Bitung agar tetap mempertahankan serta meningkatkan kinerja dalam pengelolaan APBD khususnya dalam perealisasi belanja daerah.
2. Perlu memperhatikan pertumbuhan – pertumbuhan belanja agar dapat dilakukan penghematan sehingga penggunaanya tetap efisien.
3. Perlu adanya perhatian lebih untuk belanja – belanja yang berguna untuk jangka panjang dan memiliki manfaat lebih untuk masa mendatang, misalnya belanja modal.
4. Perlu memperhatikan untuk perealisasi anggaran terhadap anggaran agar tetap melakukan penghematan karena berpengaruh pada kinerja pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfatika, I. N., & Susilowati, D. (2022). Analisis Belanja Daerah dan Fenomena Flypapereffect Pemerintah Kab/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 6(4), 553–568.
- Angraini, D., Yuniawati, R. A., Nirwana, N. K. A., Sugianto, S., & Sari, S. H. P. (2023). Analisis Pengaruh Anggaran Biaya Produksi dan Anggaran Kas Terhadap Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Perusahaan Dagang: Literature Review Akuntansi Manajemen. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 778–785.
- Aprsiansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(1), 44–62.
- Amianto, D. D., & Sati, A. (2023). Pengaruh Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang. In *Jurnal pengembangan ilmu akuntansi dan keuangan* (Vol. 2, Issue 1, pp. 36–49).
- Azahra, A., & Lubis, F. A. (2022). Peran DPRD dalam Pengawasan dan KendalaKendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 8234–8245.
- Bestari, K. A., & Wahyuni, F. (2023). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 163–184.
- Chartady, R., Meifari, V., Wulandari, T., & Utami, R. (2022). Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA). *Media Bina Ilmiah*, 17(1), 93–100.
- Digantari, K. (2024). Evaluasi Kinerja Keuangan dalam Mengelola Dana Desa dengan Menilai Efisiensi dan Pertumbuhan Melalui Rasio-rasio Tertentu. In *Jurnal Bisnis Kreatif dan Inovatif (JUBIKIN)* (Vol. 1, Issue 1).
- Hartati, S., Hendri, E., Hendri, E., Lilianti, E., & Lilianti, E. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 2(2), 167–185.
- Hasanah, M., & Anitasari, M. (2020). Analisis Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014-2017 (Tinjauan Efisiensi Dan Efektivitas). *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(2), 1–12.
- Kandioh, A. P., Morasa, J., Mawikere, L. M., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Sam, U., & Manado, R. (2023). *Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 Pada Badan Kepegawaian Danpengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado Evaluation of Regional Budget Realization Report based on Government Regulation N. 07(04)*, 4–11.
- Lintong, J. S., Limpeleh, E. A. N., & Sungkowo, B. (2020). Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes “Kineauan” Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 16(1), 95–101.
- Majampoh, W. T., & Datu, C. (2022). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9(2), 1731–1741.

- Milenia, A. F., Sibarani, J. L., & Hidayat, A. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota seSumatera Utara. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 5(2), 105–113.
- Paat, H. p, Nangoi, G. B., & Pusung, R. J. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 2979–2988.
- Paputungan, N. C. (s), M. H. (s), R. S. (s). (2023). Analisis Penerapan Pp No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 18(71), 192–201.
- Qur'ani, S., & Panggiarti, E. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Pada Pemerintahan Kota Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 60–70.
- Saidno, & Ediyono, S. (2023). Reviu Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Dalam Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Tegal Tahun 2023. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(11), 1–11.
- Sheila, S. D. R., & Rahmi, S. D. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2020 Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(1), 292–300.
- Sholikhah, A. L., & Priyono, N. (2022). Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 1–12.
- Silitonga, P. V. (2022). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Prima*, 4(1), 1–17.
- Supit, C. G., Lintong, J. S., Tumiwa, kiet, Wenas, J. G., Walukouw, I. M., & Negeri Manado, P. (2022). *Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Bitung)*. 6(1), 1– 15.
- Thalib, A., Sugeha, H., Sujianto, A., Hurudji, S., & Sahrul, M. (2022). Praktik Akuntansi Keuntungan Berbasis Nilai Sabari Dan Huyula (Studi Kasus pada Pedagang Sembako di Gorontalo). *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit Syariah*, 1(2), 39–56.
- Umboh, A. D., & Tinangon, J. J. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan PSAP No. 5 pada Dinas Kesehatan Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9(5), 967–974.
- Vidyasari, F. N. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–24.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Wenas, J. G., Karamoy, H., & Morasa, J. (2020). Perilaku Oportunistik Pemerintah Kota Manado Atas Perubahan Dana Alokasi Umum: Suatu Kajian Kualitatif. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7(1), 21–34.
- Wijayanti, A., & Ngadiman. (2020). Peran Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 3(1), 1–10.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran RI Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. 2022. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri No.84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023*. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.